



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KENDAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AINA AINI ISWATI HUSNAH
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 8243

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 635.000.000

1. Tanah Seluas 220 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m2/114 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 78.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR ` Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR ` Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 30.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 114.620.786

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 857.620.786

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 857.620.786

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.